

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh)**

Oleh:

Lily

Pembimbing : M.Rasuli dan Pipin Kurnia

Faculty of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail : lily_akuntansi@yahoo.com

*The Influence Of The Financial Accounting System And Accessibility Of
Financial Statements On The Accountability In Financial Management
(The Empirical Study On Local Work Unit Payakumbuh)*

ABSTRACT

This study aimed to examine the influence of the financial accounting system and accessibility of financial statements on the accountability in financial management. This study was conducted at SKPD of Payakumbuh city. The population in this study were employed who worked in the SKPD Payakumbuh city (25 government agencies). The sampling method used in this study is purposive sampling method. The respondent in this study is the head of SKPD, the head of financial, treasurer of SKPD and financial staff is a side direct related in the financial management area on government of Payakumbuh city. The sample used in this study were 100 respondents. The hypotheses then tested is multiple linear regression analysis by using SPSS version 20.0. The result of this study indicated that the financial accounting system and accessibility of financial statements influence on the accountability in financial management area. The magnitude of the effect (R^2) financial accounting system, accessibility of financial statements on the accountability in financial management area was 31,9%. While the remaining 68,1% is influenced by other independent variabel that are not observed in this study.

Keyword : Accountability, financial, management, accounting, and accessibility

PENDAHULUAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pertanggung-jawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat dan

DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggung-jawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah

dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007).

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan (Bastian, 2006). Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggung-jawaban publik melalui laporan keuangannya. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010). Semakin baik laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Namun dalam kenyataannya, BPK menemukan masih banyak permasalahan pada pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Seperti yang terjadi pada era sekarang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masih jauh dari harapan. Dilihat dari hal penyajian laporan keuangan saja, masih banyak daerah yang mendapat opini WDP (wajar dengan pengecualian), *disclaimer* dan tidak wajar. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan SKPD belum memenuhi standar yang seharusnya dan laporan keuangan tersebut tidak berkualitas karena hanya sedikit mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan tidak memberikan pendapat masih mendominasi oleh karena itu diperlukannya perbaikan-perbaikan terhadap struktur, prosedur dan sumber daya dalam penyusunan laporan keuangan, serta penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah agar terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah untuk mencapai *good governance* dan

clean government.

Agar akuntabilitas sektor publik dapat dilaksanakan diperlukan sistem akuntansi yang memadai, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparansi, adil, efektif, efisien. Pengembangan sebuah sistem yang dianggap tepat untuk dapat di implementasikan di daerah menghasilkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi. Dengan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) diharapkan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai (Abdul Halim 2004:35).

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan vertical reporting, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan (termasuk pemerintah pusat), akan tetapi juga melakukan horizontal reporting, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan Masyarakat luas sebagai bentuk horizontal accountability. Salah satu tujuan reformasi pengelolaan keuangan daerah mengubah pola pertanggung-jawaban vertical menjadi pola pertanggungjawaban horozontal dalam hal ini pertanggung-jawaban kepada para pemilihnya, mengingat kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung (Iskandar, 2014).

Masalah lainnya adalah

publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara lain) nampaknya belum menjadi hal yang umum, ketidak mampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggung-jawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet dalam Mulyana, 2006).

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses public terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006).

Sementara selama ini transparansi atau keterbukaan menjadi sesuatu yang mahal, apalagi yang menyangkut informasi atau data tentang keuangan. Hal ini sangat dirasakan oleh beberapa kalangan yang membutuhkan informasi tersebut diantaranya para mahasiswa yang melakukan penelitian yang memerlukan data- data tentang

keuangan. Bagi para birokrat data keuangan dipandang sebagai rahasia negara yang tidak semua orang boleh mengetahuinya, padahal keuangan daerah pada dasarnya adalah dana public yang setiap anggota masyarakat berhak mengetahuinya, bahkan jika perlu dilaporkan secara berkala kepada pemilik dana tersebut yakni masyarakat. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya daerah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik diperlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- 1) Apakah system akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah?
- 2) Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009) adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas publik menurut Mahmudi (2010) adalah Kewajiban *agent* (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*).

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertical (*Vertical accountability*)
Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerjab (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)
Pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat luas.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Transparansi dan akuntabilitas

keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim, 2006).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut pasal 232 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-

pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintah (Halim 2013:84).

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD (Erlina dan Rasdianto, 2013). Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah.

Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah (PPK)-SKPD. Sistem akuntansi pemerintahan daerah secara garis besar terdiri atas 4 prosedur akuntansi, yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah (Permendagri No 64 Tahun 2013).

Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ketempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatanyang wajar (Koester, 2002 dalam Rohman, 2009). Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006). Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henly *et al*, 1992, dalam Rohman, 2009).

Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan public berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004 ,dalam Mulyana, 2006).

Kerangka pemikiran

1. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas merupakan pertanggung-jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung-jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (Tania, 2009).

Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut pasal 232 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggung-jawabkan pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintah (Halim 2013:84).

Akuntabilitas terbentuk dalam sebuah laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang maka perlu untuk melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut,

menunjang pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan pertanggung-jawaban keuangan daerah maka harus perlu dikembangkan dan disusun sistem akuntansi keuangan daerah yang tepat (Keputusan Menteri Keuangan No 355/KMK07/2001).

Teori Hafiz (2011) menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan melalui proses akuntansi merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Guna dapat menghasilkan laporan keuangan yang semakin baik (tantangan) dibutuhkan tenaga-tenaga akuntansi terampil pada pemerintah daerah, hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis akuntansi bagi pegawai pemerintah daerah yang ditugaskan sebagai pengelola keuangan atau melalui rekrutmen pegawai baru yang memiliki kemampuan akuntansi keuangan daerah. Tidak hanya tenaga-tenaga akuntansi terampil tersebut, juga dibutuhkan adanya system dan prosedur pembukuan yang memadai dan kebijakan akuntansi sebagai pedoman pegawai dalam mengelola keuangan daerah.

Untuk menunjang teori yang telah diuraikan maka digunakan hasil peneliti dari soleha (2011), menurut soleha mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Berdasarkan uraian ringkas teori dan hasil penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan untuk hipotesis 1 (H_1) yaitu:

H_1 : Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggung-jawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet dalam Mulyana, 2006).

Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Apa artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik.

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung-jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut (Mahsun, 2006). Untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah harus

menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah. Berarti dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi para pengguna akan menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Untuk menunjang teori yang telah diuraikan maka digunakan hasil peneliti Anies Iqbal Mustofa (2012), menurut Anies mengatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian ringkas teori dan hasil penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan untuk hipotesis 2 (H_2) yaitu:

H_2 : Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kota Payakumbuh tahun 2015. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Payakumbuh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pengelola keuangan pada SKPD Di lingkungan pemerintah kota Payakumbuh. Responden yang dipilih dengan metode *purposive sampling*, dengan kriteria yang menjadi pelaksana pengelolaan keuangan langsung yaitu Kepala SKPD, Kabag.keuangan, bendahara SKPD dan Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah kota Payakumbuh.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei yaitu metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden dalam bentuk pertanyaan tertulis.

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program komputer *Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 20,0*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor item instrumen dengan skor total. Nilai koefisien korelasi antara skor setiap item dengan skor total dihitung dengan analisis *corrected item-total correlation*. Suatu instrument penelitian dikatakan valid apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dinyatakan valid.
2. Bila $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka dinyatakan tidak valid.

Nilai r_{tabel} dapat dilihat pada tabel r dengan persamaan $N-2 = 88-2 = 86 = 0,209$. Pengujian pertama untuk uji validitas dilakukan untuk menguji variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dari hasil pengujian yang dilakukan diketahui bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga semua item pertanyaan untuk semua variabel dapat dikatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel (Ghozali, 2013:47). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Kriteria pengujian uji reliabel adalah sebagai berikut:

- *Cronbach Alpha* $> 0,6$ Konstruksi (variabel) memiliki reliabilitas
- *Cronbach Alpha* $\leq 0,6$ Konstruksi (variabel) tidak memiliki reliabilitas

Uji reliabilitas hanya dilakukan atas data yang telah diuji validitasnya dan dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas terhadap variabel sistem akuntansi keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Realibilitas Data

No	Variabel	Jumlah Item	Koefisien Cronbach' h Alpha	Keterangan
1	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	8	0.830	Reliabel
2	Sistem Akuntansi Keuangan (X1)	7	0.653	Reliabel
3	Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	5	0.857	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS 20,0, 2015

Dilihat dari Tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya *Cronbach Alpha* pada seluruh variabel baik variabel sistem akuntansi keuangan, aksesibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah lebih besar dari 0,60 sehingga dikatakan reliabel.

c. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat atau variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas pada penelitian ini didasarkan pada uji statistik non-parametrik *one sample kolmogorov-smirnov*. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan *P value* yang diperoleh dari hasil pengujian normalitas dengan tingkat signifikan yang ditentukan yaitu sebesar 0,05. Data dikatakan berdistribusi normal jika *P value* > 0,05 (Ghozali, 2013:164). Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat atau variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas pada penelitian ini didasarkan pada uji statistik non-parametrik *one sample kolmogorov-smirnov*. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan *P value* yang diperoleh dari hasil pengujian normalitas dengan tingkat signifikan yang ditentukan yaitu sebesar 0,05. Data dikatakan berdistribusi normal jika *P value* > 0,05 (Ghozali, 2013:164). Hasil pengujian *one sample kolmogorov-smirnov* untuk variabel dependen (Y) akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)
N	88	88	88
Normal	Mean	29.3523	21.1932
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	2.51451	2.91984
Most Extreme	Absolute	.136	.132
Differences	Positive	.136	.096
	Negative	-.086	-.132
Kolmogorov-Smirnov Z		1.280	1.234
Asymp. Sig. (2-tailed)		.075	.095

Sumber: data olahan SPSS 20.0, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai **Assymp Sig Kolmogrov – Simirnov** (K-S) lebih besar dari 5% (0,05). Dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas Data

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2013:105). Uji multikolinieritas berpedoman kepada nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Faktor* (VIF). Jika nilai *tolerance* ≤ 0,10 dan VIF ≥ 10 maka terdapat multikolinieritas, tetapi jika nilai *tolerance* ≥ 0,10 dan VIF ≤ 10 maka tidak terdapat multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Uji Multikolinieritas Data
Nilai Tolerance dan VIF

Variabel independen	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	.784	1.276
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)	.784	1.276

Sumber: data olahan SPSS 20.0, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa keseluruhan nilai tolerance yang dihasilkan dalam penelitian ini berada diantara 0.1-1.0, dan nilai VIF diantara 1.0-10. Dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi multikolinieritas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji ada tidaknya kesamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model yang baik adalah homokedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *glejser*. Model dikatakan mengalami gejala heteroskedastisitas jika variabel bebas secara statis signifikan berpengaruh pada absolut residual, jika masing-masing variabel bebas dalam persamaan regresi diatas 0,05, maka bebas dari gejala heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 4
Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients ^a		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
				Beta	
(Constant)	4.745	2.350		2.019	.047
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	-.021	.089	-.029	-.237	.813
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)	-.092	.076	-.146	-1.206	.231

Sumber: data olahan SPSS 20.0, 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masing-masing variabel bebas dalam persamaan regresi diatas 0,05, maka bebas dari heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2013:110). Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson (D-W) untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi. Secara umum, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan acuan sebagai berikut (Ghozali, 2006:97):

- Jika angka D-W di bawah -2, berarti autokorelasi positif.
- Jika angka D-W di atas +2, berarti autokorelasi negative.
- Jika angka D-W di antara -2 sampai dengan +2, maka tidak ada autokorelasi.

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.579 ^a	.335	.319	2.89446	1.298

Sumber: data olahan SPSS 20.0, 2015

Dari hasil pengujian autokorelasi menunjukkan nilai *Durbin Watson* terletak antara -2 dan 2 = -2 < 1,298 < 2. Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan Model regresi berganda dengan hasil sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) sebesar 15,128. Maksudnya adalah jika variabel sistem akuntansi keuangan, aksesibilitas laporan keuangan diasumsikan nol (0), maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 15,128.
2. Nilai koefisien regresi variabel sistem akuntansi keuangan sebesar 0,294. Maksudnya adalah jika penerapan sistem akuntansi keuangan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,294 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,541. Maksudnya adalah jika terdapat aksesibilitas laporan keuangan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,541 dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Standar error (e) merupakan variabel acak dan mempunyai

distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan.

Hasil Uji Koefisien Secara Parsial (Uji Statistika t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:98). Uji t dilakukan pada signifikan 5% ($\alpha = 0,05$), maka t tabel dapat diketahui sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 t_{\text{tabel}} &= n-k-1 ; \alpha/2 \\
 &= 88-2-1 ; 0,05/2 \\
 &= 85 ; 0,025 \\
 t_{\text{tabel}} &= 1,98827 = 1,988
 \end{aligned}$$

Hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 6
Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	15.128	3.692		4.098	.000
Sistem Akuntansi Keuangan	.294	.139	.211	2.109	.038
Aksesibilitas Laporan Keuangan	.541	.120	.450	4.504	.000

Sumber: data olahan SPSS 20.0, 2015

Berdasarkan nilai t_{hitung} dan signifikansi yang diperoleh, maka uji hipotesis dapat diketahui sebagai berikut:

1. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan

Dari hasil pengujian SPSS 20.0 diperoleh nilai t hitung untuk variabel sistem akuntansi keuangan (X1) adalah 2,109 dan tingkat signifikansi 0,038

dengan menggunakan batas signifikansi 0,05. Sehingga nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,109 > 1,988$ (sig. $0,038 < 0,05$). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga pengujian hipotesis pertama (**H₁**) **diterima**.

2. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan

Dari hasil pengujian SPSS 20.0 diperoleh nilai t hitung untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan (X2) adalah 4,504 dan tingkat signifikansi 0,000 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05. Sehingga nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,504 > 1,988$ (sig. $0,000 < 0,05$). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga pengujian hipotesis kedua (**H₂**) **diterima**.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Payakumbuh. Dari dapat diketahui bahwa besarnya t hitung adalah 2.109 sedangkan nilai t tabel adalah 1,988. Kemudian nilai signifikansi adalah 0,038 dengan taraf signifikansi 0,05. Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,109 > 1,988$) dan sig. $0,038 < 0,05$. Dengan demikian variabel sistem akuntansi keuangan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Payakumbuh.

Agar akuntabilitas sektor publik dapat dilaksanakan diperlukan sistem akuntansi yang memadai, karena sistem akuntansi merupakan

pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparansi, adil, efektif, efisien. Pengembangan sebuah sistem yang dianggap tepat untuk dapat di implementasikan di daerah menghasilkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi. Dengan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) diharapkan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai (Abdul Halim 2004 : 35)

Hasil penelitian ini sejalan dengan soleha (2011) dan firmansyah (2008) yang meneliti tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang mengemukakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Saputra (2014) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Payakumbuh. Dari dapat diketahui bahwa besarnya t hitung adalah 4.504 sedangkan nilai t tabel adalah 1,988. Kemudian nilai signifikansi adalah 0,000 dengan taraf signifikansi 0,05. Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,504 > 1,988$) dan sig. $0,000 < 0,05$. Dengan demikian variabel aksesibilitas laporan keuangan secara

parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Payakumbuh.

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses public terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet dalam Mulyana, 2006).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Anies iqbal mustofa (2012) dan Peggy sande (2013), yang mengemukakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jadi dengan memeberikan kemudaha akses bagi para pengguna laporan keuangan maka akan memungkinkan berjalannya fungsi kontrol yang baik terhadap pertanggungjungan-jawaban pengguna aset daerah maupun kontrol terhadap kebijakan-kebijakan keuangan yang diambil pemerintah, baik kontrol yang dilakukan oleh badan pemeriksa, masyarakat maupun investor. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuni sastra (2013) yang mengatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2015:97). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.579 ^a	.335	.319	2.89446	1.298

Sumber: data olahan SPSS 20.0, 2015

Dari Tabel diperoleh nilai R sebesar 0.579 atau 57.9%. Sedangkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.319 atau 31.9%. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di SKPD Kota Payakumbuh dapat dipengaruhi oleh faktor sistem akuntansi keuangan, aksesibilitas laporan keuangan sebesar 31.9%. Sedangkan sisanya sebesar 68.1% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R² pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu

banyak peneliti menagnjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model terbaik. Tidak seperti *R²*, nilai *Adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang mana hasil analisa data dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara parsial sistem akuntansi keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. sedangkan hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan R sebesar 0.579 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara sistem akuntansi keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan sebesar 57,9%. Sedangkan nilai *Rsquare* 0.319 yang berarti bahwa variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah) mampu dijelaskan oleh variabel *independen* (sistem akuntansi keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan) sebesar 31.9% dan selebihnya 68.1% (100%-31.9% = 68.1%) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikuti dalam penelitian.

Keterbatasan Penelitian

Pengumpulan data melalui kuesioner membutuhkan waktu dan tenaga yang memadai untuk mengirim

ke responden terpilih. Beberapa responden tidak mengembalikan jawaban kuesioner, demikian juga waktu pengembalian tidak dapat ditentukan. Hal ini berdampak pada jumlah data penelitian yang dapat diperoleh belum maksimal. Selain itu, besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen hanya 31,9%. Hal ini menunjukkan masih terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian diatas dapat diberikan saran agar pemerintah kota Payakumbuh lebih meningkatkan lagi pertanggungjawabannya dalam mengelola keuangan daerah dengan cara meningkatkan pemahaman tentang sistem akuntansi keuangan daerah serta lebih transparansi tentang laporan keuangan daerah dengan cara mengakses laporan keuangan daerah agar pihak yang berkepentingan dan masyarakat bisa melihat serta mengetahui hasil kinerja dari setiap unit-unit SKPD atau pemerintah daerahnya. Dengan demikian akan tercapainya *good governance* (pemerintahan yang baik sesuai amanat rakyat).

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2009. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: BPFE Yogyakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. *Hasil Pemeriksaan Atas*

- Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014.* (http://www.bpk.go.id/)
- Erlina dan Sri Mulyani. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Edisi ke Kedua, Penerbit USU Press, MEDAN.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21.*
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta : Salemba Empat.
- Iskandar Saputra (2014) , pengaruh penerapan system akuntansi keuangan daerah, transparansi public dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan SKPD. *Jurnal Akuntansi*
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah.* Erlangga: Jakarta.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: BPF
- Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah.* Vol 2. No. 1
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.
- Rohman, Abdul. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah daerah (Survey Pada Pemda di Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Universitas Sebelas Maret.* Surakarta.
- Shende, Suresh dan Tony Bennet. 2004 *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration.* UNDESA
- Sande, Peggy. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Akseibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah . *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*
- Trihendarti. 2013. Langkah praktis menguasai statistik untuk ilmu sosial kesehatan konsep dan penerapannya menggunakan SPSS”, penerbit Andi Offset, Hal.3-5, Yogyakarta 55281
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Permendagri, No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah